**ABSTRAK**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan fisik merupakan bukti nyata dari keberhasilan dan terlaksananya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pembangunan secara fisik ini diperlukan pengaturan yang jelas agar sesuai dengan rencana tata ruang dengan melalui pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun Laporan Akhir dengan judul ***“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN”****.*

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Hambatan yang ditemui oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Pengamatan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan fokus dalam pengamatan ini adalah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan. Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara, obsevasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan belum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan terkadang masih melewati waktu yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana yang masih dianggap sedikit jumlahnya, serta kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

Aparat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu seharusnya lebih menggalakkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan sarana pelayanan dan kualitas pelayanan dalam melayani masyarakat agar sesuai dengan yang diharapkan dengan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan akurat. Karena dengan meningkatkan kualitas pelayanan dapat berdampak positif pada kesuksesan Implementasi kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan

**ABSTRACT**

*National Development carried out by the government in cooperation with the community for the welfare of the people of Indonesia. Physical development is a clear proof of the success and implementation of cooperation between government and society. In the physical development of this required clear arrangement to fit the spatial plan by through the implementation of Building Permit. Based on this, the authors compiled the Final Report under the title* ***"IMPLEMENTATION OF POLICY SERVICES GRANTING PERMISSION BUILDING IN THE SOUTH OF TANGERANG PROVINCE BANTEN".***

*This observation aims to find out the Implementation of Building Service Policy and License Delivery Service found by the One Stop Service Integrated Service Department in the implementation of building permit service. This observation uses qualitative methods with inductive approach and the focus in this observation is the administrative service of Building Permit. Methods in data collection are interview, obsevation, and documentation.*

*Based on the observation, it can be concluded that the Implementation of Building Service Permit Policy has not been in accordance with the prescribed procedures, the issuance of building permit letter is sometimes still past the stipulated time, the facilities and infrastructures are still considered little, and the public awareness is still very lacking stewardship of Building Permit.*

*One Stop Service Integrated Service Investment Service Official should encourage more socialization activities to the community, improve service facilities and service quality in serving the community to fit the expected with fast, timely and accurate service. Because by improving the quality of service can have a positive impact on the success of Implementation of Building Service Permit policy and improve the quality of service to the community*

*.*

*Key Words : Implementation, Service*